



- 02** GOVERNMENTODAY
Prabowo Minta Biaya Haji dan Masa Tunggu Dipangkas Lagi
- 05** NUSANTARA
Marketplace dan Platform Digital Mulai Dipajaki Per Juli
- 10** LISTSTYLE
Jerawat Pungung, Masalah Tersembunyi yang Tak Boleh Diabaikan



Messi Kian Abadi

Lionel Messi merayakan gol saat membawa Argentina menang 3-0 atas Aljazair di Piala Dunia 2026, Rabu (17/6). Hat trick yang dicetak La Pulga membuat koleksi golnya di ajang Piala Dunia mencapai 16 gol dari enam edisi turnamen, menyamai rekor legenda Jerman Miroslav Klose sebagai top skor sepanjang masa. Torehan tersebut kian mengabadikan nama Messi dalam sejarah sepak bola dunia. Dengan Argentina masih memiliki laga tersisa di fase grup, Messi berpotensi menjadi pencetak gol terbanyak tunggal dalam sejarah Piala Dunia. (ist.epa)

MUSIM BEREPUT ANGGARAN, EFISIENSI USAI?

Gelombang permintaan tambahan anggaran mewarnai pembahasan RAPBN 2027 di DPR. Setelah pemerintah gencar menggaungkan efisiensi belanja negara sepanjang 2025 dan 2026, sejumlah kementerian dan lembaga kini berbondong-bondong meminta suntikan dana baru dengan nilai fantastis. Polri mengajukan tambahan Rp66,1 triliun, BNN Rp5,05 triliun, sementara Kementerian Pertahanan meminta tambahan hingga Rp195 triliun. Di luar sektor keamanan, kementerian yang menangani perumahan, pendidikan, agama, sosial, hingga pariwisata juga mengajukan tambahan anggaran puluhan sampai ratusan triliun rupiah. Lonjakan kebutuhan belanja itu muncul ketika ruang fiskal pemerintah masih tertekan. Hingga Mei 2026, APBN mencatat defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap PDB. Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, pemerintah telah menarik utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp386 triliun. Pada saat yang sama, posisi Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US\$439,8 miliar atau sekitar Rp7.784 triliun per April 2026. Deretan usulan tambahan anggaran tersebut memunculkan pertanyaan, apakah masa efisiensi yang selama ini menjadi mantra pemerintah telah berakhir? BACA HAL 11...

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Pagu Indikatif Awal: Rp118 triliun
- Usulan Tambahan Anggaran: Rp66,1 triliun
- Rencana Penggunaan: Belanja pegawai Rp4,5 triliun untuk penyesuaian usia pensiun, kenaikan remunerasi, dan rekrutmen personel baru. Belanja barang Rp20,9 triliun untuk operasional Bhabin, Bhabinkamtibmas, penyelidikan, penyidikan, dan persiapan Pemilu 2029. Belanja modal Rp40,6 triliun untuk pembangunan rumah dinas, markas kepolisian di perbatasan, kendaraan listrik, dan SPKLU.

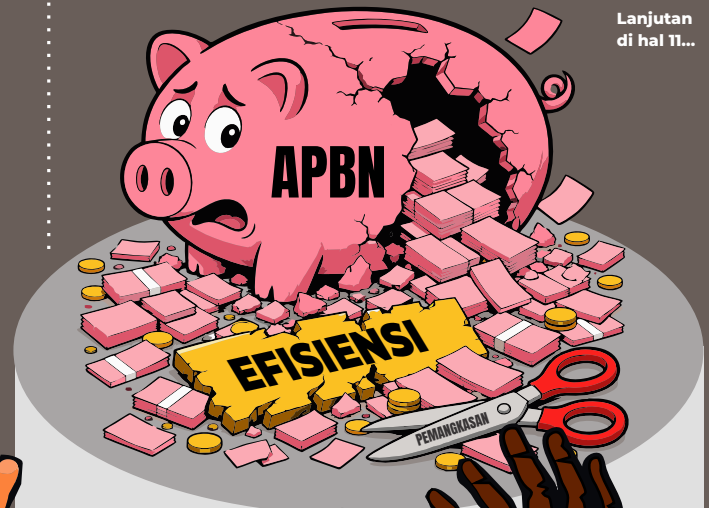
4. Kementerian Agama

- Pagu Indikatif Awal: Rp87,6 triliun
- Usulan Tambahan Anggaran: Rp41,8 triliun
- Rencana Penggunaan: Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, tunjangan guru agama, operasional KUA, serta penguatan layanan keagamaan.

5. Kemendikdasmen

- Pagu Indikatif Awal: Rp33,5 triliun
- Usulan Tambahan Anggaran: Rp40,75 triliun | Tambahan DAK Pendidikan: Rp38,52 triliun
- Rencana Penggunaan: Program wajib belajar 13 tahun, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru, serta rehabilitasi sarana pendidikan.

Lanjutan di hal 11...



Kementerian dan Lembaga

yang Meminta Tambahan Anggaran 2027

1. Kementerian Pertahanan

- Pagu Indikatif Awal: Rp167,4 triliun
- Usulan Tambahan Anggaran: Rp195 triliun
- Rencana Penggunaan: Modernisasi alutsista TNI, pemeliharaan kesiapan tempur, penguatan pertahanan perbatasan, serta peningkatan kesejahteraan prajurit.

2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

- Pagu Indikatif Awal: Rp5,1 triliun
- Usulan Tambahan Anggaran: Rp96,09 triliun
- Rencana Penggunaan: Mendukung Program 3 Juta Rumah, pembangunan hunian rakyat, serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman.



PRABOWO MINTA BIAYA HAJI DAN MASA TUNGGU **DIPANGKAS LAGI**

Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah terus mencari cara untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji sekaligus memperpendek masa tunggu keberangkatan jemaah yang masih mencapai puluhan tahun. Permintaan itu disampaikan dalam rapat bersama Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Haji, serta Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6).



Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Menhaj Irfan Yusuf, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026).

"Kemudian kami juga laporkan pengawasan kami terkait bagaimana di mekanisme keberangkatan. Imigrasi di kita sudah bagus sehingga bisa mengantisipasi jemaah-jemaah ilegal tidak bisa lolos," ujar Cucun.

Ia juga menyoroti peningkatan kualitas akomodasi jemaah reguler. Menurutnya, hampir 17.000 jemaah ditempatkan di Zona 1 sekitar Masjid

Nabawi, Madinah, termasuk di hotel-hotel bintang lima.

"Jemaah reguler sekarang hampir 17.000 jemaah diinapkan di zona 1, di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5. Sehingga kami mendengarkan testimoni dari para jemaah, 'Pak, kami enggak ngebayangkan diberikan hotel yang bagus seperti ini, bisa

melaksanakan ibadah haji di hotel bintang 5 yang tidak jauh dari masjid,'" tutur Cucun.

Perbaikan juga dilakukan pada layanan konsumsi. Kementerian Haji dan Umrah disebut berhasil bernegosiasi dengan berbagai syarikah sehingga pilihan menu makanan menjadi lebih beragam dan lebih sesuai dengan selera jemaah Indonesia.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa meski masa tunggu nasional kini berada di angka sekitar 26 tahun, rata-rata jemaah yang berangkat saat ini sebenarnya menunggu sekitar 13-14 tahun sejak mendaftar.

"Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi," kata Irfan.

Di akhir pertemuan, Cucun menyebut Prabowo meminta DPR dan pemerintah mempertahankan berbagai terobosan yang sudah berjalan baik serta terus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan haji.

"Beliau menekankan kepada kami semua, sudah bagus bapak-bapak dari DPR dengan pasukannya beliau di Kementerian Haji, bekerja sama dan berkomunikasi. Pak, itu modalnya adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPR dengan pemerintah," ujar Cucun.

Di sisi lain, Irfan mengatakan keinginan Presiden untuk menekan biaya haji akan dibahas lebih lanjut bersama DPR.

"Nanti akan dibahas, kita akan bahas bersama dengan DPR walaupun dengan harga tahun ini sangat luar biasa," kata Irfan.

Ia menegaskan pemerintah berharap biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun, penetapan biaya menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari nilai tukar rupiah, kenaikan harga avtur akibat konflik Timur Tengah, hingga peningkatan tarif layanan dari pemerintah Arab Saudi.

"Kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya," ujarnya. Cucun.(tin,rls,dtc/dya)

Ketua Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap antrean haji yang sebelumnya mencapai 35 hingga 40 tahun dan kini berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun.

"Beliau ingin bagaimana antrean ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji dan Pak Wamen semua bekerja sudah bisa ditekan sampai 26 tahun. Bahkan, beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang," ujar Cucun usai rapat.

Menurut Cucun, Prabowo mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah dan DPR dalam memperbaiki penyelenggaraan haji, namun meminta upaya pengurangan masa tunggu terus dilanjutkan agar calon jemaah dapat lebih cepat berangkat ke Tanah Suci.

DPR turut melaporkan sejumlah perbaikan layanan haji. Sistem imigrasi dinilai semakin efektif dalam mencegah keberangkatan jemaah ilegal.



Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Menhaj Irfan Yusuf, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026). Biro Pers Sekretariat Presiden

PETUGAS Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 membuka layanan tanazul bagi jemaah yang mengalami masalah kesehatan. Program ini memungkinkan jemaah dengan kondisi medis tertentu dipulangkan lebih awal ke Indonesia tanpa harus menunggu jadwal kepulangan kelompok terbang (kloter) asalnya.

Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul KKH Makkah, Syougie, menjelaskan program tersebut diperuntukkan bagi jemaah yang dinyatakan layak melakukan perjalanan udara setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Jadi program tanazul ini merupakan program di mana jemaah haji atas indikasi medis itu dipulangkan lebih awal dari kloternya

Tanazul Bantu Jemaah Sakit Pulang Lebih Cepat

atau jika jemaah hajinya dirawat di rumah sakit dan kloternya telah pulang ke Indonesia itu kita pulangkan," ujar Syougie.

Menurutnya, tidak semua jemaah yang mengajukan tanazul otomatis dapat dipulangkan lebih cepat. Setiap kasus harus melalui evaluasi medis menyeluruh untuk memastikan kondisi jemaah aman menjalani penerbangan.

Jemaah yang baru keluar dari rumah sakit maupun yang datang ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) akan diperiksa tingkat kestabilan kesehatannya. Setelah itu, tim medis berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sesuai penyakit yang diderita.

"Contoh misalnya dia ada masalah jantung kita konsulkan ke penyakit jantung, dia paska stroke kita konsulkan ke dokter saraf. Setelah itu baru nanti hasilnya kita nilai apakah layak untuk terbang atau tidak, baru nanti kita programkan untuk mutasi

kloternya ke Yanpul," jelasnya.

Hingga pertengahan Juni 2026, permohonan tanazul yang masuk ke KKH mencapai hampir 400 kasus. Berdasarkan data terakhir, terdapat 334 pengajuan yang tercatat ditambah 33 permohonan baru pada hari berikutnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 142 jemaah telah berhasil dipulangkan melalui program tanazul hingga Senin (15/6) malam.

Syougie menjelaskan tidak semua permohonan berujung pada pelaksanaan tanazul karena sebagian jemaah mengalami perbaikan kondisi sehingga dapat kembali pulang bersama kloter asalnya.

"Yang masuk itu ada hampir 400 permohonan yang masuk tetapi itu baru permohonan saja karena kadang mereka telah memohonkan tetapi jemaahnya telah pulang, itu bisa kembali dengan kloternya. Jadi permohonannya bukan ditolak tetapi dia tidak jadi kita tanazulkan," katanya.(tin,rls/dya)

PDIP MINTA PEMERINTAH DENGARKAN MAHASISWA, BANTAH TERLIBAT AKSI DEMONSTRASI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah merespons secara serius berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam gelombang demonstrasi beberapa waktu terakhir. Menurut partai berlambang banteng itu, kritik yang muncul di jalanan merupakan sinyal masih adanya persoalan dalam sejumlah kebijakan pemerintah yang perlu segera dibenahi.

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengatakan pemerintah sebaiknya membuka ruang dialog yang lebih luas terhadap kritik mahasiswa. Ia menilai tuntutan yang disampaikan tidak cukup hanya didengar, tetapi juga harus ditindaklanjuti melalui perbaikan kebijakan.

"Lebih arif, lebih bijak, pemerintah terbuka saja terhadap kritik itu," kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut Said, aksi mahasiswa muncul karena masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Salah satu yang disorot adalah tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ada kekurangan kebijakan, seperti yang saya sampaikan tata kelola BGN yang sekarang menjadi fakta," ujarnya.

Sorotan terhadap BGN menguat setelah tiga mantan petinggi lembaga tersebut ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh



Mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Timur menggelar aksi di depan gedung Negara Grahad, jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (17/6/2026). Ist

Kejaksanaan Agung. Kasus itu memicu kritik terhadap pengelolaan program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto.

Meski demikian, Said menilai pemerintah telah mulai melakukan langkah pembenahan melalui konsolidasi internal dan pemetaan ulang anggaran BGN. Ia menilai respons pemerintah sebenarnya sudah berjalan, namun belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Pada dasarnya pemerintah sudah merespons, cuma tidak tahu siapa yang mengkomunikasikan ini ke publik," kata dia.

Pernyataan tersebut muncul setelah aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus di Jakarta menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI pada Jumat, 12 Juni 2026. Dalam aksi itu, mahasiswa menuntut penghentian proyek Makan Bergizi Gratis dan pembangunan program Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, massa mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, serta menghentikan praktik militerisasi di ruang sipil. Mereka juga meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan atas berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah.

Di tengah berkembangnya isu mengenai dugaan keterlibatan PDIP dalam gerakan mahasiswa, Said secara tegas membantah partainya berada di balik demonstrasi tersebut. Ia memastikan tidak ada instruksi maupun keterlibatan organisasi partai dalam aksi mahasiswa, baik yang terjadi pada Agustus 2025 maupun Juni 2026.

Menurut Said, sikap tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Tegas yang disampaikan Ibu Megawati, karena itu bukan cara-cara PDI Perjuangan," ujar Said.

Ia juga menepis berbagai spekulasi yang mengaitkan partainya dengan sejumlah tokoh yang terlihat hadir atau memiliki kedekatan dengan peserta aksi. Salah satu nama yang disebut adalah Andi Widjajanto.

"Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," kata Said.

Ia menambahkan bahwa hubungan keluarga atau kedekatan personal seseorang dengan tokoh tertentu tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan partai dalam demonstrasi.

"Kalau dia ada besanan, ada keluarga, tidak pada tempatnya kita mempermasalahkan kedekatan kekeluargaan. Akan tetapi kalau itu dikait-kaitkan, menurut hemat saya, sangat tidak make sense sama sekali," ujarnya.(gus,ist/dya)

Gelombang Demo Mahasiswa di Sejumlah Kota, Soroti Ekonomi hingga Program MBG

GELOMBANG demonstrasi mahasiswa kembali terjadi secara serentak di berbagai daerah pada Rabu (17/6). Aksi yang mengusung tema besar "Indonesia Darurat" itu berlangsung di Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung, Salatiga, Ambon, dan sejumlah kota lain. Massa mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi nasional, melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di Jakarta, ribuan mahasiswa menggelar aksi di sejumlah titik strategis, mulai dari Gedung DPR/MPR RI, Kantor Kementerian Keuangan, Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), kawasan Monas hingga Bundaran HI. Untuk

mengantisipasi aksi tersebut, Polda Metro Jaya mengerahkan 4.576 personel gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah.

Mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi kampus menuntut pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, memperkuat nilai tukar rupiah, serta mengevaluasi sejumlah program prioritas yang dinilai membebani keuangan negara. Program MBG menjadi salah satu sasaran kritik utama karena dianggap belum menunjukkan tata kelola yang transparan di tengah kebutuhan anggaran yang sangat besar.

Di Surabaya, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS) dan BEM dari

berbagai kampus di Jawa Timur memadati kawasan depan Gedung Negara Grahad. Peserta aksi berasal dari Universitas Airlangga, Universitas Bhayangkara, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Telkom, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, hingga Universitas Negeri Surabaya.

Koordinator Umum ABS, Nasrawi

Ibnu Dahlan, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. (gus,ist/dya)



Mahasiswa Universitas Negeri Makassar menggelar aksi unjuk rasa dan memblokir Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (17/6/2026). Ist

BBM B50 DIMULAI, WAJAN DAN TANGKI KENDARAAN BEREPUT CPO

Program biodiesel B50 resmi mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dengan kebutuhan tambahan sekitar 5-6 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun. Pemerintah memastikan pasokan minyak sawit nasional tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan, namun sejumlah pengamat mengingatkan peningkatan serapan CPO untuk biodiesel berpotensi memperketat persaingan pasokan antara tangki kendaraan dan wajan dapur, terutama di tengah harga minyak goreng yang masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET).

Pemerintah memastikan implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tidak akan mengganggu ketersediaan minyak goreng nasional. Meski program tersebut diperkirakan menyerap tambahan 5-6 juta ton minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) setiap tahun, pemerintah mengklaim produksi nasional masih cukup untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus pangan.

Program B50 merupakan kebijakan pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dengan 50 persen bahan bakar minyak (BBM) fosil. Kebijakan ini menjadi

kelanjutan dari program B40 dan merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, program tersebut diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun, menekan konsumsi solar fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun, serta mengurangi beban subsidi energi hingga Rp48 triliun.

Namun, kebijakan tersebut juga memunculkan kekhawatiran terkait pasokan minyak goreng karena biodiesel dan minyak goreng sama-sama menggunakan bahan baku utama berupa CPO.

Juru Bicara Kementerian ESDM,

Dwi Anggia, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi berkurangnya pasokan minyak goreng akibat meningkatnya kebutuhan CPO untuk program B50.

"Produksi ini mencukupi baik untuk implementasi B50 maupun kebutuhan CPO untuk produksi lainnya, termasuk minyak goreng," kata Anggia di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (17/6).

Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai perhitungan kebutuhan bahan baku sebelum memutuskan menerapkan program B50 secara nasional.

Sebelum diberlakukan, uji coba B50 telah dilakukan sejak Desember 2025 pada berbagai sektor, mulai dari kendaraan bermotor, kereta api, alat berat pertambangan hingga kapal laut.

"Hasilnya, alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan dalam uji penggunaan B50 ini," ujar Anggia.

Meski demikian, pengujian pada sektor pembangkit listrik masih

berlangsung dan dijadwalkan selesai pada Oktober 2026.

Penerapan B50 diperkirakan meningkatkan kebutuhan biodiesel nasional dari sekitar 15,64 juta kiloliter menjadi 17,6 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi target tersebut, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 5-6 juta ton CPO setiap tahun.

Sebagai perbandingan, kebutuhan minyak goreng dan berbagai produk pangan berbasis sawit di dalam negeri diperkirakan mencapai sekitar 20 juta ton CPO per tahun. Dengan demikian, tambahan kebutuhan untuk B50 setara hampir sepertiga kebutuhan minyak goreng nasional. (tin,ist,kum/dya)

INDONESIA MENUJU ERA BIODIESEL B50

Formula Campuran Energi

- 50% Minyak Sawit: Berupa Fatty Acid Methyl Ester (FAME) hasil olahan kelapa sawit.
- 50% Solar Fosil: Bahan bakar diesel murni berbasis fosil.

Target & Jadwal Peluncuran

- Tanggal Rilis: Resmi diimplementasikan secara nasional mulai 1 Juli 2026.
- Status Kesiapan: Hasil uji coba performa mesin mencapai 80%-90% sukses.
- Kualitas Unggul: Memiliki kadar air yang diklaim lebih baik daripada formula B40 sebelumnya.

Dampak Lingkungan

- Potong Emisi Karbon: Menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2.
- Solusi Energi Hijau: Transisi bertahap menuju swasembada energi bersih nasional.

Tantangan Utama Industri

- Kebutuhan Bahan Baku: Memerlukan sekitar 19 juta ton CPO atau 36% dari total produksi nasional.



(Ilustrasi) Harga cabai rawit merah masih bertahan di level tinggi di atas Rp80.000 per kilogram.dok

Harga Cabai Meroket Lagi

Harga cabai kembali menjadi pemicu kenaikan harga pangan nasional pada pertengahan Juni 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia menunjukkan harga cabai merah keriting melonjak tajam hingga 21,82 persen, sementara cabai rawit merah masih bertahan di level tinggi di atas Rp80.000 per kilogram.

Berdasarkan data PIHPS pada Rabu (17/6/2026), harga cabai merah keriting naik menjadi Rp70.350 per kilogram dari posisi sebelumnya. Cabai merah besar juga meningkat 0,4

persen menjadi Rp62.600 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit merah tercatat naik 8,93 persen menjadi Rp82.300 per kilogram.

Data lain yang dirilis PIHPS Nasional pada pagi hari juga menunjukkan harga cabai rawit merah masih berada di level tinggi, yakni Rp73.000 per kilogram di tingkat pedagang eceran.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah tercatat naik 7,25 persen menjadi Rp59.900 per kilogram, sedangkan bawang putih ukuran sedang naik 7,47 persen menjadi

Rp44.600 per kilogram.

Untuk komoditas beras, sebagian besar jenis mengalami kenaikan. Beras kualitas bawah I naik 4,44 persen menjadi Rp15.300 per kilogram, sedangkan beras kualitas bawah II naik 2,76 persen menjadi Rp14.900 per kilogram.

Harga beras medium I meningkat 1,85 persen menjadi Rp16.550 per kilogram dan beras medium II naik 1,87 persen menjadi Rp16.350 per kilogram.

Sebaliknya, beras kualitas super mengalami penurunan. Beras super I turun 0,86 persen menjadi Rp17.350 per kilogram dan beras super II turun tipis 0,29 persen menjadi Rp16.950 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga cenderung bergerak turun. Minyak goreng curah turun 1,94 persen menjadi Rp20.200 per liter. Harga minyak goreng kemasan bermerek I bertahan di Rp24.150 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II turun 2,37 persen menjadi Rp22.700 per liter.



Sementara itu, harga gula pasir premium turun 0,74 persen menjadi Rp20.100 per kilogram dan gula pasir lokal turun 1,31 persen menjadi Rp18.850 per kilogram.

Di sektor protein hewani, harga daging sapi kualitas I turun 1,85 persen menjadi Rp145.850 per kilogram dan daging sapi kualitas II turun 2,72 persen menjadi Rp135.950 per kilogram. (Wid ist/dya)

MARKETPLACE DAN PLATFORM DIGITAL MULAI DIPAJAKI PER JULI

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan mulai memungut Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas aktivitas perdagangan melalui marketplace mulai Juli 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan sektor ekonomi digital sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha daring.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru bagi masyarakat.

"Karena ini kan bukan pajak baru sebenarnya. Dimintakan tahun ini, bulan Juli, mudah-mudahan," kata Bimo saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut Bimo, seluruh perangkat regulasi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut telah siap. Rencana itu juga telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta dukungan dari DPR RI.

Sebelum aturan diterapkan, DJP akan mengundang para pelaku industri e-commerce untuk menyamakan persepsi dan memastikan kesiapan sistem di masing-masing platform.

"Kalau regulasinya kan sudah siap, Pak Menteri juga sudah confirm kemarin karena dengan DPR juga didukung ya. Jadi ya kita nanti dengan pelaku industri juga akan diskusi dahulu sekali, supaya mereka siap," ujar Bimo.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan pajak marketplace lebih ditujukan untuk memperkuat administrasi perpajakan dan menciptakan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha daring dan luring.

Menurut Bimo, pemerintah telah memiliki pengalaman dalam menunjuk platform digital sebagai pemungut pajak. Hingga saat ini, DJP telah menunjuk 261 pelaku usaha digital luar negeri sebagai pemungut pajak, termasuk Netflix, Spotify, Google Play, dan Disney.

Tak hanya menasar perusahaan asing, aturan ini juga akan berlaku bagi marketplace besar dalam negeri seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan Blibli.

"Netflix, Spotify, Google Play, Disney, dan segala macam. Kalau yang di sini yang besar-besar ya Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli. Harusnya mereka lebih siap juga. Karena kan sebenarnya ini untuk level playing field ya, menciptakan keadilan antara pedagang konvensional (offline) dengan yang online," kata Bimo.

"Harusnya mereka lebih siap juga, karena kan sebenarnya ini untuk level playing field ya. Keadilan antara yang offline sama yang online," imbuhnya.

Kebijakan tersebut tertuang



(Ilustrasi) Warga menggunakan ponsel untuk berbelanja secara daring di salah satu situs belanja di Bogor, Jawa Barat. (ant.dok)

dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang diundangkan pada 14 Juli 2025. Aturan itu mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem

elektronik atau marketplace memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet penjual yang bertransaksi secara daring.

Merujuk Pasal 8 PMK tersebut,

besaran pungutan PPh Pasal 22 adalah 0,5 persen dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (widistkum/dya)

TREN PERTUMBUHAN NILAI EKONOMI DIGITAL DARI TAHUN KE TAHUN

- Tahun 2018: Nilai total ekonomi digital Indonesia baru berkisar di angka USD 27 miliar.
- Tahun 2024: Nilai ekonomi digital Indonesia melonjak tajam hingga mencapai USD 90 miliar. Sektor e-commerce mendominasi dengan kontribusi sekitar USD 71 miliar.
- Tahun 2025: Total nilai transaksi ekonomi digital menembus USD 130 miliar (lebih dari Rp2.100 triliun).
- Tahun 2030 (Proyeksi): Nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi melesat hingga USD 360 miliar. Sektor digital ini diperkirakan menyumbang 11% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
- Tahun 2045 (Target): Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital dapat mencapai 20% dari total PDB Indonesia.

Pedagang Online Kini Wajib Punya NIB

PEMERINTAH mewajibkan seluruh pelaku usaha yang berjualan melalui platform e-commerce memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh skala usaha, mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan besar.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku sejak 8 Juni 2026.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengajak seluruh pelaku usaha yang belum memiliki NIB untuk segera mengurus legalitas usahanya. Ia menegaskan proses pengajuan NIB tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Pelaku usaha hanya perlu menyiapkan data identitas dan informasi usaha, kemudian membuat akun dan mengajukan NIB melalui laman OSS. Pemerintah berharap kemudahan tersebut dapat mendorong semakin banyak pelaku usaha masuk ke sektor formal.

"Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha berkontribusi menegakkan regulasi sekaligus membuka kesempatan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan hingga program pembinaan dan kemitraan di pasar digital yang semakin kompetitif," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6).

Menurut Budi, kewajiban memiliki NIB merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib, transparan, dan berdaya saing.

Seiring berlakunya Permendag Nomor 19 Tahun 2026, setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki perizinan berusaha paling sedikit berupa NIB. Tidak hanya pedagang, penyelenggara marketplace juga mendapat kewajiban baru.

Platform e-commerce diwajibkan menolak pendaftaran pedagang yang

belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, legalitas usaha menjadi syarat utama untuk dapat berjualan di marketplace.

Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha memiliki waktu cukup untuk menyesuaikan diri. Pedagang yang sudah lebih dulu berjualan di platform digital diberikan masa tenggang selama 18 bulan untuk memenuhi kewajiban perizinan. Sementara bagi pedagang baru, masa tenggang yang diberikan adalah enam bulan.

Pemerintah berharap masa adaptasi tersebut dapat memperlancar proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih tertata tanpa memberikan beban berlebihan kepada pelaku usaha..(wid,rls/dya)

Perangi Tengkulak, Pemkot Batu Hubungkan Petani Langsung ke Pasar Modern

Ilustrasi: Petani apel di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu saat masa panen. (foto: DistanKP Kota Batu)



proses budidaya hingga pemasaran hasil panen, awal sampai akhir. Pada tahap pemasaran nanti ada lembaga profesional yang sudah memiliki jaringan ke pasar modern. Ini menjadi upaya memberantas tengkulak," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DistanKP) Kota Batu, Hendry Suseno, dikutip pada Rabu (17/6).

BATU- Pemerintah Kota (Pemkot) Batu saat ini tengah menyiapkan strategi berupa smart integrated farming atau pertanian cerdas terintegrasi. Hal ini akan difokuskan untuk memerangi tengkulak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dengan menghubungkan pemasaran produk langsung ke pasar modern.

"Strategi ini dirancang dengan konsep menyeluruh. Artinya mulai dari

Selama ini, menurutnya praktik tengkulak dinilai kerap merugikan petani karena hasil panen dibeli dengan harga rendah, kemudian dijual kembali ke pasar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi tersebut membuat nilai keuntungan yang diterima petani menjadi tidak optimal.

Karena itu, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu ini

menempatkan peningkatan kesejahteraan petani sebagai tujuan utama dalam implementasi smart integrated farming.

Ditegaskannya, lembaga yang akan menjadi mitra penyerap hasil panen akan melalui proses seleksi ketat oleh pemerintah daerah.

Selain memperbaiki rantai distribusi, program ini juga akan memodernisasi sistem dan tata kelola pertanian melalui pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, hasil panen diharapkan mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan pasar modern.

"Sehingga produk pertanian yang dihasilkan akan sesuai dengan spesifikasi dari pasar modern," katanya. Hendry menyebut, pihaknya juga telah memproyeksikan lahan seluas 2,5 hektare di Kelurahan Giripurno, Kecamatan Batu, sebagai lokasi pelaksanaan tahap awal program tersebut.

Di lokasi tersebut smart integrated farming akan dijadikan pilot project yang nantinya dapat direplikasi oleh seluruh kelompok tani di Kota Batu.

"Saat ini terdapat 290 kelompok tani

yang tersebar di tiga kecamatan, meliputi Kecamatan Batu sebanyak 66 kelompok tani, Kecamatan Bumiaji dengan 151 kelompok tani, dan di Kecamatan Junrejo ada sebanyak 73 kelompok tani," papar Hendry.

Menurutnya, penerapan teknologi dalam sektor pertanian diharapkan mampu memberikan nilai tambah pada produk sekaligus meningkatkan daya saing hasil pertanian daerah.

"Bertani dengan menggunakan teknologi mampu menghadirkan nilai tambah kepada produk pertanian dan tentu karena program ini merupakan visi misi Pak Wali Kota, kami harus berkolaborasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain," katanya.

Sebagai informasi, pada triwulan I 2026, komoditas sayuran Kota Batu didominasi oleh produksi petersai atau sawi yang mencapai 28.790,73 kuintal. Selanjutnya, wortel sebanyak 22.705,39 kuintal, kentang 21.427,56 kuintal, bawang daun 16.015,17 kuintal, kembang kol 15.554,52 kuintal, kubis 11.569,95 kuintal, dan bawang merah 6.391,30 kuintal. (Santi/Dya)

Kota Malang Usul MBG Berbasis Sekolah, Ketua DPRD: Efektif dan Minim Risiko

MALANG- Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita, mengusulkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis sekolah atau school based kitchen. Menurutnya, konsep tersebut lebih efektif dalam menjamin kualitas makanan, mempermudah pengawasan, sekaligus meminimalkan berbagai risiko.

"Sebetulnya dari awal ketika program MBG hadir dan digaungkan oleh pemerintah pusat, dalam bayangan saya secara pribadi itu akan berbasis sekolah. Karena ketika berbasis sekolah, mungkin tingkat efektivitasnya akan lebih akurat dan sekolah bisa punya mekanisme yang tepat untuk memproduksi makanan tersebut," ujarnya, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Rabu (17/6).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, konsep tersebut berpotensi meminimalkan berbagai persoalan yang belakangan muncul dan menjadi sorotan dalam pelaksanaan MBG, termasuk temuan makanan basi, dugaan keracunan, maupun kendala

teknis lainnya.

"Mungkin school based kitchen ini bisa menjadi rekomendasi yang baik untuk program ini," katanya.

Selain perubahan skema pelaksanaan, Amithya juga mendorong pemerintah pusat memperkuat sistem pengawasan melalui Satgas MBG di daerah. Menurutnya, evaluasi berkala menjadi kunci agar setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Ia mengusulkan agar setiap sekolah diwajibkan menyampaikan laporan rutin mengenai pelaksanaan teknis MBG, mulai dari proses distribusi hingga kondisi penerima manfaat.

Selain itu, laporan berkala setiap 6 bulan juga dinilai penting untuk mengukur apakah tujuan utama program dalam meningkatkan status gizi peserta didik benar-benar tercapai.

"Misalnya setiap bulan sekolah wajib mereport perihal pelaksanaan teknis. Kemudian enam bulan sekali ada pelaporan terkait perbaikan gizi dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali penyempurnaan yang bisa

dilakukan Satgas dalam program ini," ungkapnya.

Tak hanya itu, Amithya juga menyoroti pentingnya pengaturan ulang segmentasi penerima manfaat. Ia menilai alokasi anggaran yang besar seharusnya diprioritaskan kepada daerah yang benar-benar membutuhkan sehingga pelaksanaan program menjadi lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, DPRD Kota Malang akan menjadikan berbagai temuan dalam pelaksanaan MBG sebagai bahan evaluasi pada rapat yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Juni mendatang.

Hasil evaluasi tersebut juga akan menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyempurnaan program.

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini berharap pemerintah



Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita. (Santi/Lentera)

pusat dapat memaksimalkan fungsi Satgas MBG di daerah untuk melakukan supervisi terhadap mekanisme teknis pelaksanaan program. Sebab, menurutnya, kebijakan dengan anggaran besar harus dibarengi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan secara konsisten.

"Percuma kalau kita punya kebijakan tetapi tidak dimonitor dan dievaluasi. Jangan sampai kita menginvestasikan sekian banyak uang rupiah untuk kemudian teledor dalam supervisinya," pungkasnya. (Santi/Dya)

SAAT G7 MENEKAN, PUTIN HIMPUN DUKUNGAN ASEAN

Presiden Rusia, Vladimir Putin, mulai Rabu (17/6) menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rusia-ASEAN di Kota Kazan. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya tekanan negara-negara Barat yang tergabung dalam Group of Seven agar Rusia segera mengakhiri perang di Ukraina.



Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat forum Bisnis Asean-Rusia di Kazan, Rabu (17/6).

KTT Rusia-ASEAN dimanfaatkan Moskow untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan digelar di Kazan, ibu kota Republik Tatarstan yang berjarak sekitar 700 kilometer dari Moskow. Pada waktu yang hampir bersamaan, para pemimpin negara anggota G7 juga menggelar pertemuan tingkat tinggi di Prancis.

Salah satu agenda utama KTT G7 adalah membahas upaya mengakhiri perang Ukraina yang telah berlangsung sejak Rusia melancarkan invasi ke negara tersebut empat tahun lalu. Para pemimpin G7 dilaporkan sepakat untuk meningkatkan tekanan terhadap Moskow agar menghentikan operasi militernya.

Di sisi lain, pemerintah Rusia menegaskan bahwa KTT di Kazan diselenggarakan untuk memperingati 35 tahun hubungan kemitraan antara Rusia dan ASEAN.

Menurut Kremlin, sejumlah negara ASEAN mengirimkan pemimpin pemerintahannya ke Kazan. Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Singapura diwakili oleh perdana menteri masing-masing. Sementara itu, Filipina mengutus langsung presidennya, Ferdinand Marcos Jr.

Myanmar juga menjadi salah satu peserta yang menarik perhatian. Negara yang memiliki hubungan erat dengan Rusia dan menghadapi isolasi dari negara-negara Barat sejak kudeta

militer itu dipastikan mengirim delegasi ke pertemuan tersebut.

Dari Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono telah tiba di Kazan sejak Selasa (16/6) waktu setempat untuk mengikuti rangkaian agenda KTT.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah Rusia menyebut para pemimpin akan bertukar pandangan mengenai berbagai isu global dan

regional. Rusia berharap pertemuan ini dapat membuka babak baru kerja sama dengan ASEAN.

"Ini untuk menetapkan tujuan baru dalam hubungan Rusia-ASEAN di bidang keamanan, perdagangan, investasi, dan kerja sama kemanusiaan," demikian pernyataan Pemerintah Rusia yang dikutip Reuters.

Sementara itu, Perdana Menteri

NILAI PERDAGANGAN INDONESIA-RUSIA (2025 KUMULATIF)

Total Perdagangan
~ **USD 5,00 Miliar**

○ Ekspor RI ke Rusia
~ **USD 5,00 Miliar**

○ Impor RI dari Rusia
~ **USD 3,10 Miliar**

○ Neraca Perdagangan (Defisit)
~ **USD 1,20 Miliar**

KET : ~ Sekitar

Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan kunjungannya ke Rusia juga akan dimanfaatkan untuk membahas isu ketahanan energi. Menurutnya, sejumlah negara Asia saat ini menghadapi tekanan pasokan energi akibat ketidakstabilan situasi di Timur Tengah.

Di tengah sanksi Barat yang masih berlaku, Rusia--salah satu produsen minyak terbesar dunia--terus menjadikan kawasan Asia sebagai pasar utama ekspor energinya.

"Kami ingin memastikan pasokan minyak dapat terus disalurkan ke Malaysia," kata Anwar.

KTT di Kazan pun menjadi ajang penting bagi Rusia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, sekaligus menunjukkan bahwa Moskow masih memiliki mitra strategis di tengah tekanan diplomatik dan ekonomi dari Barat terkait perang Ukraina.

Para pemimpin negara-negara anggota G7 menyepakati dua langkah utama untuk memperkuat dukungan militer bagi Ukraina dalam KTT yang berlangsung di Evian, Prancis, pada 15-17 Juni 2026. Selain meningkatkan pasokan persenjataan, mereka juga menyatakan kesiapan untuk mempertimbangkan pemberian lisensi produksi senjata kepada Kyiv. (gus,ist/kum/dya)

Prabowo Absen di KTT ASEAN-Rusia, Istana: Fokus Urusan Dalam Negeri



Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi

diselesaikan di dalam negeri.

"Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri," kata Prasetyo di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6).

Prasetyo menjelaskan, keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh intensitas komunikasi dan pertemuan yang telah dilakukan Prabowo dengan para pemimpin negara-negara ASEAN dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai banyak isu penting kawasan yang sebelumnya sudah dibahas dalam berbagai forum, termasuk saat Presiden melakukan kunjungan ke Filipina.

"Yang kedua juga, dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN, beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina, banyak

juga yang sudah didiskusikan," ujarnya.

Selain hubungan dengan negara-negara ASEAN, Prasetyo menegaskan komunikasi bilateral antara Indonesia dan Rusia tetap berjalan aktif. Ia mengingatkan bahwa Prabowo belum lama ini telah bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan membicarakan berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

Menurut Prasetyo, sejumlah komitmen yang dihasilkan dari pertemuan tersebut kini telah memasuki tahap tindak lanjut teknis oleh pihak terkait.

"Termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia, beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal. Dan dari beberapa hal yang komitmen kerja sama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis," pungkasnya. (gus,ist/kum/dya)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Rusia. Menurutnya, kepala negara memilih memusatkan perhatian pada sejumlah agenda strategis yang masih harus



Tren Curhat ke AI, Ahli Harvard Ingatkan Gangguan Kesehatan Sosial dan Emosional

Fenomena orang yang semakin sering menjadikan chatbot AI seperti ChatGPT atau Claude sebagai tempat bercerita kini makin umum. Banyak pengguna merasa nyaman karena respons AI cepat, terdengar ramah, dan seolah selalu memahami apa yang mereka rasakan. Bahkan, sebagian orang mulai menjadikannya “teman curhat” untuk mencari dukungan emosional sehari-hari.

Namun, sejumlah peneliti dan ahli etika dari Harvard University mengingatkan bahwa kebiasaan ini tidak sepenuhnya aman jika dilakukan terus-menerus. Dalam diskusi etika teknologi, mereka menilai chatbot yang terlalu suportif dapat memengaruhi cara manusia berpikir, berinteraksi, hingga memahami relasi sosial di kehidupan nyata.

Empati AI Hanya Simulasi

Para ahli menegaskan bahwa empati yang ditampilkan AI bukanlah empati sungguhan. Sistem tersebut hanya menyusun respons berdasarkan pola bahasa, bukan karena benar-

benar memahami perasaan manusia. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Carissa Véliz, Associate Professor of Philosophy dari University of Oxford, yang menilai bahwa chatbot didesain untuk membuat pengguna merasa nyaman agar terus menggunakannya. Ia menegaskan, “Tidak ada siapa pun di balik layar yang benar-benar peduli pada Anda.”

Menurutnya, istilah “empati AI” sebenarnya menyesatkan karena mesin hanya meniru bahasa emosional manusia, bukan merasakan emosi itu sendiri.

Risiko Terlalu Banyak Validasi

Véliz juga mengingatkan bahwa jika seseorang terlalu sering menerima validasi dari AI, ia bisa menjadi kurang siap menghadapi kritik dari manusia lain di dunia nyata. Padahal, perbedaan pendapat justru penting untuk perkembangan pribadi.

Ia bahkan mencontohkan secara lugas, “Kalau Anda membosankan, penting juga untuk tahu bahwa Anda memang membosankan.”

Maksudnya, umpan balik yang tidak selalu menyenangkan tetap diperlukan dalam interaksi sosial yang sehat.

Dampak pada Relasi Sosial

Para panel ahli juga menyoroti risiko ketergantungan emosional pada AI, terutama pada anak dan remaja. Chatbot yang selalu setuju dan sabar bisa membuat ekspektasi terhadap hubungan manusia menjadi tidak realistis. Akibatnya, interaksi dengan orang lain yang lebih kompleks bisa terasa melelahkan atau mengecewakan. Profesor dari Harvard Law School, Jonathan Zittrain, menilai bahwa AI memang bisa bermanfaat dalam pendidikan maupun layanan tertentu. Namun ia mengingatkan adanya risiko ketergantungan sosial.

Ia menyebut, “Itu menjadi versi murah dari hubungan manusia yang sebenarnya.”

AI Tidak Bisa Menggantikan Dunia Nyata

Meski demikian, para ahli tidak menolak keberadaan AI. Teknologi ini tetap dianggap bermanfaat untuk membantu pekerjaan, riset, hingga akses informasi. Namun, mereka menekankan pentingnya menjaga keseimbangan agar manusia tidak kehilangan interaksi sosial nyata.

Véliz menambahkan bahwa perkembangan AI justru bisa menjadi pengingat pentingnya pengalaman langsung yang tidak tergantikan

teknologi, seperti berbicara tatap muka, membaca buku, atau beraktivitas di ruang publik.

Ia menegaskan, “Tidak peduli seberapa canggih AI nantinya, AI tidak akan pernah menjadi dunia analog.”

AI dapat menjadi alat bantu yang berguna, termasuk sebagai teman diskusi ringan. Namun, hubungan sosial di dunia nyata tetap tidak bisa digantikan. Perbedaan pendapat, kritik, dan interaksi langsung tetap menjadi bagian penting dalam perkembangan emosi dan sosial manusia, terutama dalam lingkungan keluarga dan pendidikan. (ist/dya)

Tren Pertumbuhan AI Chatbot Skala Global

Lonjakan pengguna aktif:

ChatGPT mencapai sekitar 900 juta pengguna aktif mingguan, naik lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya yang sekitar 400 juta.

Interaksi harian tinggi:

Sekitar 88% orang di dunia pernah berinteraksi dengan chatbot. Dari jumlah itu, sekitar 65% pengguna.

Pasar terus tumbuh pesat:

Nilai pasar global AI chatbot sekitar \$9,56 miliar, diproyeksikan meningkat hingga \$41,24 miliar dengan pertumbuhan tahunan sekitar 19,6% (CAGR).

Ada Celah Zero-Day di Android 14-16, Google Desak Pengguna Segera Update

Pengguna Android kembali diingatkan untuk segera memperbarui perangkat mereka setelah Google merilis buletin keamanan Android untuk Juni 2026. Pembaruan ini menjadi perhatian besar karena ditemukan adanya celah keamanan serius yang bahkan sudah dimanfaatkan dalam serangan di dunia nyata.

Celah tersebut dikenal dengan kode CVE-2025-48595 dan termasuk kategori zero-day, yaitu jenis kerentanan yang sudah dieksploitasi sebelum diperbaikannya tersedia. Kondisi ini membuatnya jauh lebih berbahaya karena penyerang lebih dulu memanfaatkan celah sebelum pengguna sempat melakukan

pembaruan. Menurut laporan keamanan, celah ini berdampak pada hampir semua versi Android yang masih didukung, mulai dari Android 14, Android 15, Android 16, hingga Android 16 QPR2. Artinya, sebagian besar pengguna perangkat Android modern berpotensi terdampak jika belum memasang patch terbaru.

Dari sisi teknis, CVE-2025-48595 berada di dalam Android Framework dan dikategorikan sebagai kerentanan high-severity. Jenis serangannya adalah elevation of

privilege, yaitu kondisi ketika penyerang bisa meningkatkan hak akses di sistem hingga akhirnya berpotensi mengambil alih perangkat.

Yang membuatnya semakin berbahaya, laporan intelijen menunjukkan bahwa celah ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna lokal tanpa autentikasi. Dalam skenario serangan, pelaku bisa mengeksekusi kode berbahaya melalui celah integer overflow, lalu menaikkan hak akses hingga memperoleh kendali penuh atas sistem.

Jika sudah mencapai tahap itu, penyerang berpotensi mengakses data sensitif, memodifikasi file, bahkan mengganggu fungsi perangkat secara keseluruhan. Lebih mengkhawatirkan lagi, Google menegaskan bahwa eksploitasi celah ini tidak membutuhkan interaksi dari pengguna sama sekali. Dengan kata lain, perangkat bisa saja diserang tanpa korban perlu mengklik tautan, membuka aplikasi, atau menyetujui izin apa pun.

Meski demikian, Google menyebut bahwa eksploitasi yang terjadi saat ini masih bersifat terbatas dan tertarget. Namun, perusahaan belum merinci lebih jauh siapa yang menjadi target maupun bagaimana pola serangan dilakukan.

Sebagai langkah pencegahan, Google menyarankan pengguna untuk segera memasang pembaruan keamanan begitu tersedia di perangkat masing-masing. Perlindungan terhadap CVE-2025-48595 telah disediakan melalui security patch level 2026-06-05,

sehingga pengguna dianjurkan memastikan perangkatnya sudah mencapai level tersebut. Untuk mengeceknya, pengguna bisa masuk ke menu Settings, lalu memilih About phone, kemudian membuka Android version, dan melihat bagian security patch level. Jika levelnya masih di bawah 2026-06-05, pembaruan sebaiknya segera diperiksa dan dipasang saat tersedia.

Gadget Pertama dengan Android 17

Google resmi mulai menggulirkan sistem operasi terbaru Android 17 sejak 16 Juni 2026. Namun, pembaruan ini tidak langsung tersedia untuk semua pengguna Android dan hanya diluncurkan secara bertahap.

Seperti tradisi sebelumnya, Google Pixel menjadi perangkat pertama yang menerima Android 17, sebelum kemudian menyebar ke merek lain seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan OnePlus dalam beberapa bulan ke depan melalui proses penyesuaian masing-masing produsen.

Berdasarkan data dari blog resmi Google, perangkat Pixel yang lebih dulu kebagian Android 17 meliputi lini Pixel 10 series, Pixel 9 series, Pixel Fold, Pixel Tablet, hingga Pixel 8 series. Pembaruan akan dikirim secara over-the-air (OTA) secara bertahap.

Android 17 membawa sejumlah fitur baru, termasuk "Bubbles" yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam jendela melayang sehingga pengguna bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus dengan lebih fleksibel. Google juga menambahkan Bubble Bar untuk memudahkan akses aplikasi yang sedang berjalan. (ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDOARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAANG I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT
PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Jerawat Punggung, Masalah Tersembunyi yang Tak Boleh Diabaikan

Jerawat sering kali identik dengan wajah. Namun dalam dunia dermatologi, punggung justru menjadi salah satu area yang paling “ramah” bagi jerawat untuk berkembang tanpa banyak disadari. Ia tidak selalu terlihat di cermin, tetapi dampaknya bisa terasa jelas: gatal, nyeri, hingga rasa tidak percaya diri saat mengenakan pakaian terbuka.

Jerawat punggung bisa muncul dalam berbagai bentuk, benjolan merah, whiteheads, hingga komedo. Meski tampak sederhana, kondisi ini kerap lebih bandel dibanding jerawat wajah karena karakter kulit di area punggung yang berbeda.

Secara biologis, jerawat terjadi ketika sebum atau minyak alami kulit, sel kulit mati, serta bakteri menumpuk dan menyumbat pori-pori. Sumbatan ini kemudian memicu peradangan. Pada kondisi tertentu, folikel rambut bisa membengkak hingga membentuk whitehead, sementara komedo muncul saat sumbatan terpapar udara.

Dokter kulit Dr. Justine Kluk menjelaskan kepada Marie Claire bahwa karakter kulit punggung menjadi salah satu alasan utama kondisi ini mudah terjadi. Ia mengatakan, “Kulit di punggung kita sangat tebal, sehingga potensi pori-pori tersumbat sangat tinggi.”

Pernyataan ini memperjelas bahwa jerawat punggung bukan sekadar “versi lain” dari jerawat wajah, tetapi memiliki dinamika kulit yang berbeda.

Di balik benjolan kecil yang muncul di punggung, terdapat proses biologis yang cukup kompleks. Dermatolog Kara Shah, MD dari Cincinnati, menjelaskan mekanisme ini dengan lebih detail.

“Jerawat punggung adalah hasil dari akumulasi sel kulit mati dan minyak (sebum) di dalam pori-pori di kulit, dikombinasikan dengan pertumbuhan berlebih dari bakteri kulit yang umum, Cutibacterium acnes, yang memicu respons peradangan,”

katanya.

Artinya, jerawat bukan hanya soal kulit berminyak, tetapi juga interaksi antara produksi sebum, regenerasi sel kulit, dan keseimbangan mikrobioma kulit. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini dapat dipicu oleh banyak faktor yang sering kali tidak disadari.

Faktor pertama adalah genetika. Jerawat dapat muncul karena faktor keturunan, termasuk kecenderungan mengalami jerawat di area punggung.

Faktor kedua adalah obat-obatan tertentu. Beberapa jenis obat, termasuk antidepresan, dapat memicu munculnya jerawat sebagai efek samping.

Kemudian faktor hormon menjadi salah satu pemicu paling umum, terutama pada masa pubertas. Namun pada perempuan dewasa, perubahan hormon saat menstruasi dan kehamilan juga dapat memperburuk kondisi kulit.

Keringat hingga Gaya Hidup Modern

Dalam gaya hidup modern yang aktif, keringat menjadi salah satu pemicu terbesar jerawat punggung. Aktivitas olahraga, perjalanan panjang, hingga cuaca panas dapat meningkatkan produksi keringat secara signifikan.

Kara Shah menjelaskan bahwa kondisi ini semakin buruk ketika dikombinasikan dengan pakaian ketat dan aktivitas fisik. Ia mengatakan, “Jerawat di punggung umumnya terkait dengan aktivitas olahraga yang menyebabkan peningkatan keringat dan gesekan dari peralatan dan pakaian atletik.”

Kombinasi keringat dan gesekan inilah yang sering menciptakan kondisi ideal bagi pori-pori untuk tersumbat.

Selain itu, stres juga sering dikaitkan dengan kondisi kulit yang memburuk, meski bukan penyebab langsung. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pola makan tertentu dapat berperan. American Academy of Dermatology mencatat bahwa karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi seperti roti putih dan keripik kentang dapat memengaruhi kadar gula darah yang berhubungan dengan jerawat. Produk susu juga disebut sebagai pemicu pada sebagian individu. (ist/dya)

Dari Kebiasaan Fesyen hingga Skincare

Mengatasi jerawat punggung tidak cukup hanya dengan satu langkah. Dibutuhkan kombinasi perawatan kulit, perubahan kebiasaan, dan konsistensi.

Sabun dengan bahan aktif

Penggunaan sabun tubuh yang mengandung benzoil peroxide menjadi salah satu rekomendasi utama. Kandungan ini bekerja membunuh bakteri penyebab jerawat dan mengurangi peradangan.

Kebiasaan mandi setelah aktivitas

Dermatolog sangat menekankan pentingnya mandi setelah berkeringat. Keringat yang dibiarkan menempel terlalu lama, terutama di bawah pakaian ketat, dapat memperburuk kondisi kulit. Mengganti pakaian segera setelah aktivitas juga menjadi langkah penting.

Pakaian longgar dan breathable

Gesekan dari pakaian seperti sport bra, ransel, atau jaket ketat dapat memicu acne mechanica. Karena itu, bahan katun atau kain yang mudah

menyerap keringat menjadi pilihan yang lebih aman untuk kulit.

Shampoo anti ketombe

Dalam beberapa kasus, jerawat punggung bukan jerawat biasa, melainkan folikulitis jamur. Kondisi ini ditandai dengan bintik kecil seragam dan rasa gatal. Penggunaan shampoo ketokonazol sebagai body wash beberapa kali seminggu dapat membantu mengatasinya.

Retinoid untuk regenerasi kulit

Retinoid membantu mempercepat regenerasi sel kulit dan membuka pori-pori yang tersumbat. Penggunaannya disarankan pada malam hari, dimulai dari frekuensi dua hingga tiga kali seminggu untuk menghindari iritasi.

Kebersihan pakaian

American Academy of Dermatology menekankan pentingnya mencuci pakaian olahraga setelah digunakan.

Pakaian yang kembali dipakai tanpa dicuci dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri dan memperparah jerawat. (*)



Musim Berebut ...dari hal 1

Daftar usulan tambahan anggaran kementerian hingga lembaga negara terus bertambah. Kementerian Pertahanan menjadi salah satu yang mengajukan tambahan terbesar. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta tambahan anggaran Rp195 triliun untuk tahun 2027. Tambahan dana itu dibutuhkan untuk mempercepat modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), menjaga kesiapan tempur TNI, memperkuat pertahanan wilayah perbatasan, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Dalam rapat bersama DPR, Rabu (17/6) Sjafrie menegaskan kebutuhan pertahanan tidak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan nasional. Menurut dia, sistem pertahanan merupakan "safety belt" atau sabuk pengaman bagi pembangunan negara. "Sistem pertahanan negara merupakan safety belt bagi pembangunan nasional," ujar Sjafrie.

Di sektor keamanan dalam negeri, Polri mengajukan tambahan anggaran Rp66,1 triliun dari pagu indikatif sekitar Rp118 triliun. Dana tambahan itu akan digunakan untuk belanja pegawai, operasional kepolisian, pembangunan markas baru di wilayah perbatasan, pengadaan rumah dinas, hingga kendaraan listrik dan fasilitas pendukungnya.

Sebagian anggaran juga direncanakan untuk mendukung operasional Bhabinkamtibmas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta persiapan pengamanan Pemilu 2029. Polri beralasan kebutuhan tersebut meningkat akibat penyesuaian remunerasi, rekrutmen personel baru, kenaikan biaya operasional, serta dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah pengadaan strategis.

Permintaan tambahan dana juga datang dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga ini mengajukan tambahan anggaran Rp5,05 triliun dari pagu indikatif Rp1,44 triliun. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto memperingatkan bahwa keterbatasan anggaran berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemberantasan narkotika.

"Penyesuaian ini kami arahkan sepenuhnya untuk menajamkan program," kata Suyudi dalam rapat dengan DPR.

Menurut dia, tambahan anggaran dibutuhkan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial, layanan laboratorium narkotika, tim asesmen terpadu, serta berbagai program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN bahkan menyebut operasional lembaga berpotensi lumpuh apabila kebutuhan anggaran tidak dipenuhi.

Sekolah Rakyat Terganggu Jika Ditolak

Namun fenomena berebut anggaran tidak hanya terjadi di sektor pertahanan dan keamanan. Kementerian yang menangani program sosial juga menyampaikan peringatan serupa.

Kementerian Sosial mengajukan tambahan anggaran Rp22,49 triliun untuk tahun 2027. Jika disetujui, total anggaran Kemensos akan meningkat menjadi Rp107,2 triliun. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut sejumlah program prioritas pemerintah terancam terganggu apabila tambahan dana tersebut tidak diberikan.

Program yang paling terdampak adalah Sekolah Rakyat, program pendidikan bagi keluarga miskin yang menjadi salah satu unggulan pemerintah.

"Sebanyak 101.606 siswa Sekolah Rakyat akan terdampak, karena operasional ini di tahun 2027 masih kekurangan Rp3,64 triliun. Tentu ini

akan mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR.

Menurut Kemensos, dampak kekurangan anggaran tidak berhenti pada sektor pendidikan. Sebanyak 1,46 juta lansia dan penyandang disabilitas tunggal miskin terancam tidak menerima bantuan langsung berkelanjutan karena kebutuhan anggaran Rp3,5 triliun belum tersedia.

"Nilai anggarannya sebesar Rp3,5 triliun yang belum tersedia," ujar Gus Ipul.

Selain itu, sekitar 420 ribu keluarga berisiko tidak menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) karena kekurangan anggaran Rp1,01 triliun. Sebanyak 270 ribu anak yatim piatu terancam tidak memperoleh bantuan rehabilitasi sosial. Sebanyak 5.133 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berpotensi tidak menerima tali asih, sementara 390 ribu keluarga penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial

KPK Tolak Usulan Anggaran Rp 5 Triliun

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyo menegaskan lembaganya tidak akan mengajukan tambahan anggaran hingga Rp5 triliun untuk tahun 2027 sebagaimana disarankan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Menurut Setyo, KPK hanya mengusulkan tambahan anggaran sesuai kebutuhan riil untuk menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6), Setyo mengatakan usulan tambahan anggaran yang diajukan telah mempertimbangkan kebutuhan unit penindakan, pencegahan, koordinasi dan supervisi, hingga pendidikan serta peran serta masyarakat.

"Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat," ujar Setyo.

Pernyataan itu muncul setelah Sahroni menyela pemaparan kebutuhan anggaran KPK. Awalnya, Sahroni mempertanyakan usulan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar yang diajukan lembaga antirasuah tersebut.

"Pak Ketua, sebentar, sebelum lanjut. Jadi, Bapak cuma ngajuin 762 nih ya?" tanya Sahroni.

Setelah mendapat penjelasan bahwa angka tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan KPK,

Sahroni justru menyarankan agar lembaga itu mengajukan anggaran jauh lebih besar.

"Tapi, saran saya Pak, saran ya, karena Pak Presiden sudah ngomong Pak. Jadi, kalau Bapak tampilin di paparan tadi, kan minta berapa-berapa saja dikasih. Pak, ajuin 5T Pak! Tanggung Pak!" kata Sahroni.

Politikus Partai NasDem itu bahkan berkelakar Komisi III akan terus mengingatkan janji Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat aparat penegak hukum jika permintaan anggaran KPK tidak dipenuhi pemerintah.

"Nanti kalau Pak Presiden enggak kasih, ah kita videonya kita buka terus nanti supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya. Setuju enggak kita teman-teman?" ujarnya.

Menanggapi saran tersebut, Setyo menyampaikan apresiasi, namun menegaskan bahwa kebutuhan anggaran yang diajukan sudah dihitung secara matang.

"Siapa. Terima kasih pimpinan."
"Jadi, ini sudah kami hitung-hitung sebenarnya," lanjutnya.

Setyo menjelaskan KPK belajar dari pengalaman penyusunan anggaran tahun sebelumnya. Karena itu, lembaganya berupaya menyusun kebutuhan dana secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Artinya begini, kalau misalkan ini pengalaman 2026, kalau 2026 itu kan ada penurunan, ada penajaman. Kami kalau misalkan tidak ada penajaman itu juga sangat mendukung. Jadi, harapannya dengan penambahan yang 762 itu, ini

Ekonomi (PPSE) tidak dapat dijangkau program graduasi kemiskinan. (wid,ist,ant,kum/dya)

DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA YANG MEMINTA TAMBAHAN ANGGARAN 2027

Lanjutan dari hal 1...

7. Kementerian Perhubungan

- ✓ Pagu Indikatif Awal: Rp28,34 T
- ✓ Usulan Tambahan Anggaran: Rp20,11 T
- ✓ Rencana Penggunaan: Dukungan keselamatan transportasi Rp7,98 triliun, pelayanan transportasi Rp9,17 triliun, layanan perintis Rp957 miliar, dan kebutuhan belanja pegawai Rp2 triliun guna menjaga konektivitas nasional.

8. Badan Narkotika Nasional

- ✓ Pagu Indikatif Awal: Rp1,44 T
- ✓ Usulan Tambahan Anggaran: Rp5,05 T
- ✓ Rencana Penggunaan: Rehabilitasi medis dan sosial, laboratorium narkotika, tim asesmen terpadu, serta program P4GN untuk pemberantasan narkotika.

9. Kementerian Pariwisata

- ✓ Pagu Indikatif Awal: Rp1,01 T
- ✓ Usulan Tambahan Anggaran: Rp1,99 T
- ✓ Rencana Penggunaan: Promosi destinasi prioritas, pengembangan desa wisata, dan peningkatan kualitas SDM pariwisata.

10. Kementerian Kebudayaan

- ✓ Pagu Indikatif Awal: Rp953,28 M
- ✓ Usulan Tambahan Anggaran: Rp3,99 T
- ✓ Rencana Penggunaan: Penguatan ekosistem kebudayaan, pelestarian warisan budaya, dan program strategis kebudayaan nasional.

11. Kementerian Koperasi

- ✓ Pagu Indikatif Awal: Rp542,89 M
- ✓ Usulan Tambahan Anggaran: Rp1,34 T
- ✓ Rencana Penggunaan: Penguatan koperasi nasional dan percepatan program ekonomi kerakyatan.

12. Kementerian PPPA

- ✓ Pagu Indikatif Awal: Rp187,2 M
- ✓ Usulan Tambahan Anggaran: Rp392,4 M
- ✓ Rencana Penggunaan: Perlindungan perempuan dan anak, penanganan kekerasan, serta penguatan kelembagaan.

13. Komisi Pemberantasan Korupsi

- ✓ Pagu Indikatif Awal: Rp1,22 T
- ✓ Usulan Tambahan Anggaran: Rp989 M
- ✓ Rencana Penggunaan: Penguatan penindakan, pencegahan korupsi, digitalisasi sistem, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

sudah bisa mengkomodir," katanya.

Dalam pemaparannya, Setyo mengungkapkan pagu indikatif KPK tahun 2027 hanya sebesar Rp1,23 triliun. Angka itu turun Rp349 miliar atau sekitar 22 persen dibandingkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026. "Jadi, pagu indikatifnya adalah Rp1,23 triliun," ujar Setyo. (wid ist/dya)

KEJAGUNG RESMI SEGEL GUDANG MOTOR LISTRIK BGN

Kejaksanaan Agung (Kejagung) menyegel gudang penyimpanan ribuan sepeda motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarif Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik turun langsung untuk memeriksa jumlah kendaraan yang tersimpan sekaligus melakukan penyegelan.

"(Kunjungan) untuk mengecek jumlah (sepeda motor listrik) dan menyegel," kata Syarif di Jakarta, Rabu (17/).

Menurut Syarif, penyidik menduga masih terdapat gudang penyimpanan motor listrik di sejumlah lokasi lain. Karena itu, pengecekan dan penyegelan akan dilakukan secara bertahap.

"Bertahap itu," ujarnya.

Penyegelan dilakukan setelah



Deretan motor listrik terlihat di area pabrik perakitan kawasan Citeureup, Kabupaten Bogor. Fasilitas produksi ini sempat menjadi perhatian publik setelah terlibat dalam pengadaan kendaraan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam jumlah besar.dok

Kejagung mengusut dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang untuk Program MBG. Salah satu temuan utama penyidik adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai Rp1,035 triliun.

Dalam perkara ini, Kejagung menduga terjadi praktik mark up harga pengadaan. Dana proyek tersebut disebut telah dibayarkan seluruhnya kepada PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), meskipun

perusahaan itu dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai vendor karena tidak memiliki dealer maupun bengkel aktif.

Selain pengadaan motor listrik, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek lainnya. Di antaranya pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan diduga mengalami mark up, pengadaan 31.994 unit tablet dengan indikasi serupa, serta pengadaan 5.400 unit televisi yang juga disebut tidak memenuhi ketentuan dan mengalami pembengkakan harga.

Sejauh ini Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, pihak swasta Asep Yusuf Soemantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono.

Andri Mulyono diduga berperan sebagai penyedia motor listrik dalam proyek BGN. Kejagung juga masih mendalami keterlibatan berbagai pihak lain, termasuk proses pengadaan dan penggunaan anggaran yang nilainya mencapai sekitar Rp1 triliun.

Kasus ini menjadi salah satu perkara besar yang menjerat Program Makan Bergizi Gratis. Ribuan motor listrik yang kini terparkir dan mangkrak di gudang Sentul menjadi barang bukti penting dalam upaya Kejagung mengungkap dugaan korupsi pengadaan di lingkungan BGN.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari juga menanggapi polemik pengadaan sekitar 21 ribu motor listrik senilai lebih dari Rp 1 triliun yang kini menjadi bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi MBG.

Menurut dia, seluruh aset yang telah dibeli menggunakan uang negara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya."

Ia menegaskan evaluasi tidak hanya menasar motor listrik, tetapi juga berbagai perangkat lain yang telah dibeli menggunakan anggaran negara.

"Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibidang laptop, dibidang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan."(tin,ist/dya)

Spesifikasi Motor MBG

- Model yang digunakan antara lain Emmo JXXGT bergaya trail.
- Daya motor 7.000 Watt dengan kecepatan maksimum 85-90 km/jam.
- Baterai 72V 31Ah mendukung fast charging (30%-80% sekitar 1 jam).
- Ground clearance 320 mm, dirancang untuk medan berat

Kontroversi Harga

- BGN menyebut harga per unit sekitar Rp42-43 juta, lebih rendah dari harga pasar yang diklaim Rp52 juta.
- Kejaksanaan Agung menduga terjadi markup dalam proyek pengadaan senilai lebih dari Rp1 triliun, dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Siswa SMA Potensi Dicoret Program MBG

kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima manfaat 81,5 juta."

Namun, BGN tengah mengkaji ulang kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian lainnya.

"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain."

Arumsari menjelaskan intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak.

"Yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal."

BGN juga memastikan efisiensi anggaran masih akan dilakukan

sehingga pagu indikatif berpotensi berubah.

"Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi."

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menghapus siswa SMA dari daftar penerima MBG, khususnya sekolah yang dinilai berasal dari kelompok ekonomi mampu.

"Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya."

"Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi."

Menurut Arumsari, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat sehingga program dapat lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.(wid,ist/dya)

SELAIN tata kelola dan anggaran, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat MBG pada 2027. Saat ini BGN mendapat pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat.

"Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya